

Sosialisasi Strategi Pengelolaan Sistem Retribusi Pengunjung di Kawasan Wisata Puncak 2000 Siosar Tanah Karo Sumatera Utara

Socialization of the Strategy for the Management of the Visitor Retribution System in the Puncak 2000 Tourism Area, Siosar Tanah Karo North Sumatra

Rahmaniah¹, Chairina^{2*}, Ismayani³, Nunti Sibuea⁴, Joko Priono⁵, Nur Subiantoro⁶

^{1,3,4,5} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

^{2,6}STIE Graha Kirana Medan

Corresponding author: chairinanst68@gmail.com*

Abstrak

Adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan sistem retribusi pengunjung di kawasan wisata agar kawasan wisata tersebut tetap menjadi tempat tujuan yang nyaman bagi wisatawan dan akan tetap menjadi tempat tujuan wisata pavorit. Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diketahui: 1) Pengelola Kawasan wisata Puncak 2000 Siosar Tanah Karo Sumatera Utara adalah masyarakat setempat; 2) Masyarakat antusias dan senang dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kawasan wisata sebab memberikan masukan dan ilmu bagi mereka; 3) Dari gambar dapat diketahui dari jumlah 40 orang besarnya hasil wawancara setuju adanya kutipan sebesar 18 % = 18, kemudian kurang setuju 30 % = 12 dan tidak setuju 25% = 10. Sehingga jika diakumulasikan pendekatan tidak setuju adanya kutipan retribusi di kawasan wisata uncah 2000 Siosar Tanah Karo Sumatera Utara sebesar = 55 %. Dan yang setuju = 45 %.

Kata Kunci: Sosialisasi: Strategi: Pengelolaan: Retribusi: Kawasan Wisata.

Abstract

The purpose of this community service is to contribute to the community on the importance of managing the visitor levy system in tourist areas so that the tourist area remains a comfortable destination for tourists and will remain a favorite tourist destination. From the results of community service activities, it is known that: 1) The management of the Puncak 2000 Siosar Tanah Karo tourism area, North Sumatra, is the local community; 2) The community is enthusiastic and happy to carry out community service activities in tourist areas because it provides input and knowledge for them; 3) From the picture, it can be seen that from the number of 40 people, the size of the interview results agreed that there was a quote of 18% = 18, then 30% = 12 disagreed and 25% disagreed = 10. So if the accumulated approach disagrees with the levy quote in the Uncak tourist area 2000 Siosar Tanah Karo, North Sumatra = 55%. And those who agree = 45%.

Keywords: Socialization: Strategy: Management: Retribution: Tourism Area.

PENDAHULUAN

Kawasan wisata merupakan tempat yang menjadi tujuan banyak orang ketika menikmati hari libur kerja maupun sekolah, sehingga potensi pengelolaan benefit kawasan wisata sangat menjanjikan dalam upaya meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar kawasan wisata. Akan tetapi dari hasil perjalanan penulis ke beberapa tempat wisata ada beberapa kawasan wisata yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi penulis maupun pengunjung, sehingga walaupun kawasan wisata tersebut sudah diviralkan atau dipromosikan melalui berbagai media tidak akan menjadi tempat wisata pavorit dari wisatawan. Dan bahkan lebih buruk lagi malah menjadi tempat yang dilupakan oleh wisatawan dikarenakan adanya informasi negatif dari wisatawan-wisatawan yang telah berkunjung melalui media sosial on line dan media lainnya.

Penulis tertarik ingin mengetahui faktor-faktor penyebab kawasan wisata tidak menjadi tujuan pavorit wisatawan baik dimulai dari pengalaman pribadi penulis maupun melalui wawancara dengan wisatawan lainnya di kawasan wisata. Dan hasilnya beragam alasan. Diantaranya, permasalahan ketersediaan fasilitas umum (seperti Toilet yang bersih, rumah ibadah, ketersediaan Air bersih dll), kuliner, ketersediaan cendera mata, buah tangan, sikap masyarakat kawasan wisata, uang kutipan retribusi, spot pandang, parkir kendaraan dan servis pihak pengelola.

Adakalanya kawasan wisata dikelola oleh masyarakat setempat tanpa ikut campu pemerintahan daerah ataupun kota, sehingga secara administratif dan dekoratif pengelolaan kawasan wisata tidak menarik.

Pada bahasan kali ini penulis dan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat membahas tentang pengelolaan sistem retribusi pengunjung di kawasan wisata, melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat kawasan wisata di Puncak 2000 Siosar Tanah Karo Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan sistem retribusi pengunjung di kawasan wisata agar kawasan wisata tersebut tetap menjadi tempat tujuan yang nyaman bagi wisatawan dan akan tetap menjadi tempat wisata pavorit.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dimulai dengan melakukan wawancara kepada pengelola tempat wisata, kemudian kepada masyarakat kawasan wisata, pedagang dan pengunjung. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Strategi Pengelolaan Sistem Retribusi Pengunjung di Kawasan Wisata secara ceramah dan juga memberikan tulisan ilmiah tentang materi ceramah tersebut.

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN PKM

Materi Ceramah

Pemahaman Mengenai Pariwisata

Dalam pemahaman mengenai pariwisata akan dijabarkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu kawasan pariwisata, maka terdapat beberapa faktor atau komponen yang harus dipenuhi agar kegiatan pariwisata dapat berjalan sempurna (Inskeep, 1991) yaitu a) Atraksi wisata, b) Fasilitas Pariwisata, dan c) Aksesibilitas.

a. Atraksi Wisata

Salah satu unsur yang sangat menentukan berkembangnya

Industri pariwisata adalah atraksi wisata. Di Negara Indonesia, istilah atraksi wisata belum terlalu dikenal, istilah yang biasa digunakan yaitu daya tarik wisata yang sebenarnya memiliki pemahaman yang sama. Adapun definisi atraksi wisata menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Pendit (1994), atraksi wisata adalah segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat, baik yang hadir secara natural, maupun yang biasa berlangsung tiap harinya serta yang khusus diadakan pada waktu tertentu.
- 2) Menurut Yoeti (1996), atraksi wisata adalah sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat, dan dinikmati sebagai motivasi wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata.
- 3) Menurut UU No. 10 tahun 2009, atraksi wisata atau daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Dari definisi atraksi wisata yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa atraksi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik baik yang hadir secara natural ataupun hasil buatan manusia sebagai motivasi wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata.

Daerah tujuan wisata sesungguhnya telah memiliki atraksi wisata, namun yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung, suatu daerah tujuan wisata harus memenuhi tiga syarat (Yoeti, 1996) yaitu:

- 1) Adanya something to see, artinya, di tempat tersebut harus ada atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan begitu daerah tersebut harus mempunyai daya tarik khusus dan mempunyai atraksi wisata yang dapat dijadikan hiburan bila wisatawan berkunjung ke sana.

- 2) Adanya *something to buy*, artinya, di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (*shopping*), terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan yang khas sebagai ole-ole untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing wisatawan.
- 3) Adanya *something to do*, artinya, di tempat tersebut ada sesuatu yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lebih lama di tempat itu.

Ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat berpengaruh untuk pemasaran pariwisata, yaitu dengan promosi untuk mencapai sasaran agar lebih banyak wisatawan yang datang pada suatu daerah, lebih lama tinggal, dan lebih banyak mengeluarkan uang di tempat yang mereka kunjungi.

b. Fasilitas Wisata

Fasilitas wisata merupakan elemen dalam daerah tujuan wisata yang memungkinkan wisatawan tinggal di daerah tersebut untuk menikmati atau berpartisipasi dalam atraksi wisata yang ditawarkan.

1) Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana wisata dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Adapun jenis prasarana wisata menurut Lothar A. Kreck terbagi atas dua bagian yaitu (Yoeti, 1996):

Prasarana Perekonomian, yang dibagi atas:

- Transportasi, misalnya: pesawat udara, kapal laut, kereta api, bus, taxi dan kendaraan lainnya.
- Komunikasi, misalnya: telepon, telegraf, radio dan televisi, surat kabar, dan pelayanan kantor pos.
- Utilitas, misalnya: jaringan listrik, persediaan air minum, sistem irigasi dan sumber energi.
- Sistem Perbankan, misalnya: bank, dan *money changer*.
- Prasarana Sosial, yang dimaksud dengan prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang ada, dibagi atas:
 - Sistem pendidikan, lembaga pendidikan yang memelihara dan mengawasi suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang kepariwisataan, misalnya: Lembaga/Organisasi Kepariwisata di Sri Lanka, Kementerian Pendidikan (*Ministry of Education*) di Afganistan.
 - Pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke daerah wisata, misalnya: klinik atau rumah sakit.

- Keamanan, pelayanan keamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke daerah wisata, misalnya: polisi, petugas keamanan.

2) Sarana Wisata

Pendit (1994) menyebut sarana wisata dengan perusahaan pariwisata. Perusahaan pariwisata adalah semua perusahaan yang tujuan pelayanannya khusus diperuntukkan bagi perkembangan kepariwisataan dan kehidupan usahanya bergantung pada pariwisata. Perusahaan pariwisata terbagi atas dua, sebagai berikut:

a. Perusahaan Pariwisata Utama

- Perusahaan akomodasi, termasuk hotel, penginapan, *motel pension losmen*, peristirahatan, tempat berlibur, asrama, *homestay*, dan sebagainya.
- Tempat peristirahatan khusus bagi pengunjung yang sakit beserta kliniknya.
- Perusahaan angkutan publik, termasuk angkutan darat, laut, dan udara.
- Perusahaan pengrajin atau manufaktur, seperti perusahaan kerajinan tangan (*souvenir*), kartu pos bergambar, penerbitan buku petunjuk kepariwisataan, dan sebagainya.
- Toko-toko penjual *souvenir*.
- Usaha-usaha khusus yang menyediakan dan menyajikan tempat-tempat rekreasi dan hiburan lain khusus untuk wisatawan.
- Organisasi atau usaha yang menyediakan pramuwisata (*guide*), penerjemah, sekretaris, juru tik, juru transkripsi, dan sebagainya.
- Klub atau lembaga yang khusus mempromosikan pariwisata dengan mengelola, mengatur perbaikan, dan kebersihan objek yang dikunjungi wisatawan.

b. Perusahaan Pariwisata Sekunder

Perusahaan pariwisata sekunder tidak sepenuhnya tergantung pada wisatawan, melainkan juga sebagian besar diperuntukkan bagi masyarakat setempat, seperti:

- Perusahaan yang membuat kapal-kapal khusus untuk wisatawan seperti kapal pesiar, gerbong khusus wisatawan, mobil dan bis, *motorboat* dan sebagainya.
- Toko pakaian, perhiasan wanita, alat-alat potret dan film, alat kecantikan, dan sebagainya.
- Toko binatang, tukang cukur, toko ahli kecantikan, salon kecantikan, dan sebagainya.

3) Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan mudah atau sulitnya wisatawan menjangkau tujuan wisata yang diinginkan. Komponen ini mempengaruhi biaya, kelancaran dan kenyamanan terhadap seorang wisatawan yang akan menempuh suatu atraksi. Elemen-elemen tersebut ialah (Middleton, 1989 dalam Pitana dan Diarta, 2009) :

- Infrastruktur Transportasi, seperti jalan, bandara, jalur kereta api, pelabuhan laut, marina.
- Perlengkapan, meliputi ukuran, kecepatan, jangkauan dari sarana transportasi umum.
- Faktor-faktor operasional seperti jalur/rute operasi, frekuensi pelayanan, dan harga yang dikenakan.
- Peraturan Pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan transportasi.

Dari uraian pemahaman mengenai pariwisata yang terdiri dari atraksi wisata, fasilitas wisata dan aksesibilitas, dapat disimpulkan bahwa jenis atraksi wisata terbagi atas tiga yaitu (Pitana dan Diarta, 2009): atraksi wisata alam, atraksi wisata sosial dan budaya, dan atraksi minat khusus. Dalam kawasan Pantai Losari beberapa atraksi wisata tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut; Atraksi wisata alam yaitu reklamasi anjungan Pantai Losari yang menyajikan keindahan Pantai Losari dan keindahan *sunset* dan *sunrise* yang dapat dilihat pada Pantai Losari. Atraksi wisata sosial dan budaya yaitu bangunan bersejarah dan museum Benteng Fort Rotterdam, dan kawasan kuliner Kota Makassar yang menyajikan masakan khas Kota Makassar. Atraksi wisata minat khusus yaitu wisatawan yang senang berbelanja terdapat Pusat Ole-Ole Kota Makassar yang menjual berbagai macam kerajinan, pakaian, emas, alat musik tradisional dan lain sebagainya.

Fasilitas wisata dari pemahaman di atas terbagi atas dua yaitu sarana wisata dan prasarana wisata (Yoeti,1996). Sarana wisata dan prasarana tersebut harus tersedia pada kawasan pariwisata untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan wisatawan, sehingga wisatawan ingin berkunjung ke daerah tujuan wisata tersebut. Aksesibilitas merupakan komponen yang mempengaruhi biaya, kelancaran dan kenyamanan terhadap seorang wisatawan yang akan menempuh suatu atraksi (Middleton 1989). Untuk melakukan kegiatan wisata, tiap atraksi wisata harus memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata. Dalam suatu kawasan pariwisata yang memiliki keragaman atraksi wisata perlu untuk memberikan aksesibilitas yang mudah dan jelas bagi wisatawan untuk berkunjung ke tiap atraksi wisata tersebut, sehingga semua atraksi wisata dapat dikunjungi oleh wisatawan.

Pemahaman Tentang Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Menurut Suparmako dalam Bella, dkk (2014) Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung dan diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Kemudian retribusi menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah menurut

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Pasal 18 Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Pasal 2-3 Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum,
2. Retribusi Jasa Usaha,
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara (Marihot, 2006).

Adapun maksud dari pungutan tersebut adalah peralihan dari sektor swasta ke sektor publik (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Dari pengertian pungutan tersebut maka unsur-unsur didalam pungutan adalah:

- 1) Unsur pemerintah (sektor publik)
- 2) Unsur masyarakat (sektor swasta)
- 3) Unsur undang-undang (sebagai dasar terjadinya peralihan kekayaan)
- 4) Unsur kepentingan umum yang diselenggarakan.

Pungutan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: pajak, retribusi, dan sumbangan. (Sumyar, 2004).

1) Pajak

Pajak adalah merupakan pungutan tetapi dengan sifat khusus, yaitu tanpa adanya jasa timbale balik secara langsung. Hubungan pemerintah (fiskus) dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik, karena pemerintah hanya mempunyai hak saja, yaitu hak untuk memungut pajak.

Sedangkan sebaliknya wajib pajak hanya mempunyai kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk membayar pajak. Adapun ciri khusus dari pajak adalah bahwa terdapat pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal secara langsung. Artinya, jasa timbal dari pemerintah ada tetapi tidak secara langsung ditujukan kepada wajib pajak yang bersangkutan, dan jasa timbalnya biasanya ditujukan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan umum. Misalnya

diwujudkan dalam bentuk jalan-jalan, bangunan-bangunan, maupun sarana lain yang semuanya ditujukan untuk kepentingan umum.

2) Retribusi

Retribusi juga merupakan pungutan, tetapi dalam retribusi ada jasa timbal secara langsung, yaitu langsung kepada setiap pembayar retribusi. Hubungan antara pemerintah dan pembayar retribusi adalah hubungan timbal balik yang bersifat sempurna, artinya seimbang antara hak dan kewajibannya. Ciri khusus dari retribusi adalah dapat ditunjukkannya jasa timbal secara langsung. Misalnya retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi tempat rekreasi, rekening listrik, rekening PAM, dan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

3) Sumbangan

Sumbangan juga merupakan pungutan, tetapi dengan jasa timbal kepada sekelompok orang. Hubungan antara pemerintah dengan pembayar sumbangan merupakan hubungan timbal balik yang bersifat sempurna.

b. Jenis-jenis pemungutan retribusi

Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1) Retribusi jasa umum

- a) Retribusi jasa umum tidak bersifat pajak dan tidak bersifat retribusi
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi jasa usaha

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya

harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi perizinan tertentu

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar. Sehingga, layak dibiayai dari retribusi perizinan. (Kurniawan, 2004)

Adapun tentang jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air.

c. Kriteria Retribusi

Untuk dapat memungut retribusi suatu sumber Pendapatan Daerah, perlu adanya kriteria yang menjadi pertimbangan apakah sumber Pendapatan daerah itu layak untuk dipungut retribusinya. Menurut Kesit (2005:57) kriteria tersebut yaitu:

- a) Kecukupan dan Elastisitas
Retribusi harus responsif terhadap variable-variable yang mempengaruhinya.
- b) Keadilan
Retribusi yang bersangkutan tidak sewenang-wenang, tidak memihak pada golongan tertentu atau dengan kata lain tidak ada perlakuan yang berbeda yang menguntungkan perseorangan atau golongan.
- c) Kemampuan Administrasi
Retribusi dalam pemungutannya harus bersidat sederhana, mudah ditaksir, dan dapat dipungut serta dihimpun dengan cepat.
- d) Kesepakatan Politik
Retribusi harus dapat dimengerti dan sesuai dengan keinginan yang layak dan harus dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik
- e) Penilaian retribusi oleh Pemerintah

Penilaian ini dimaksudkan bahwa Pemerintah Daerah mengharapkan retribusi memberikan kontribusi berarti terhadap sumber-sumber Pendapatan daerah.

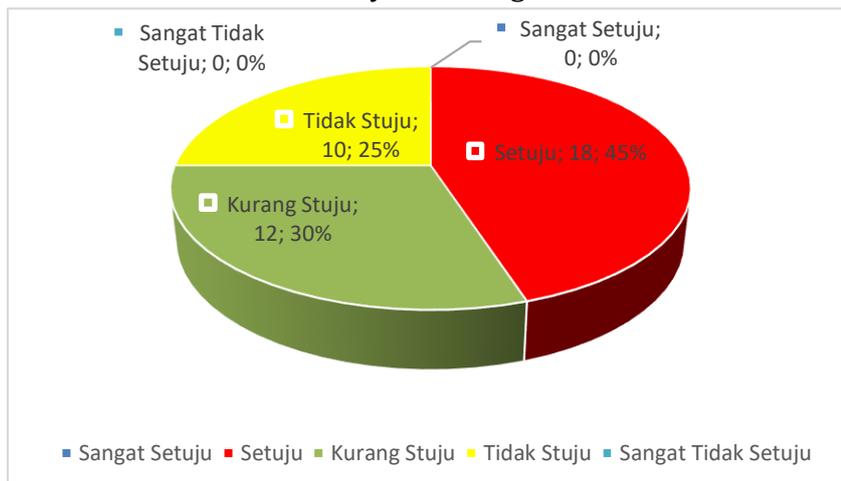
3. Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata

Pajak berbeda dengan retribusi daerah baik dari segi pemungutannya maupun pengelolaannya, karena retribusi terkait dengan layanan tertentu setelah wajib retribusi memenuhi kewajibannya maka sudah sewajarnya jika kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga harus pintar mengelola dana retribusisepenuhnya untuk perkembangan daerah atau obyek yang menghasilkan retribusi tersebut. Pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai perbaikan seperti perluasan basis retribusi, pengendalian terhadap kebocoran dana retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 maka retribusi daerah baru bisa di lakukan apabila ada pelayanan atau jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari pemerintah. Tanpa pelayanan atau imbalan yang langsung dapat dinikmati oleh wajib retribusi, retribusi tidak dapat dikenakan. (Dewantoro 2001:220).

Hasil Kegiatan PKM

Setelah melakukan sosialisasi selanjutnya pelaksana PKM melakukan wawancara kepada pengelola kawasan wisata, pedagang, masyarakat dan pengunjung sebanyak 40 orang, sehingga diperoleh data tentang pengaruh kutipan retribusi terhadap minat wisatawan berkunjung ke Kawasan Wisata Puncak 2000 Siosar Tanah Karo Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Kuisisioner Tentang Kutipan Retribusi Kawasan Wisata

Dari gambar dapat diketahui dari jumlah 40 orang besarnya hasil wawancara setuju

adanya kutipan sebesar 18 % = 18, kemudian kurang setuju 30 % = 12 dan tidak setuju 25%= 10. Sehingga jika diakumulasikan pendekatan tidak setuju adanya kutipan retribusi di kawasan wisata uncah 2000 Siosar Tanah Karo Sumatera Utara sebesar = 55 %. Dan yang setuju = 45 %.



Gambar 2. Kegiatan PKM

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diketahui:

- 1) Pengelola Kawasan wisata Puncak 2000 Siosar Tanah Karo Sumatera Utara adalah masyarakat setempat;
- 2) Masyarakat antusias dan senang dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kawasan wisata sebab memberikan masukan dan ilmu bagi mereka;
- 3) Dari gambar dapat diketahui dari jumlah 40 orang besarnya hasil wawancara setuju adanya kutipan sebesar 18 % = 18, kemudian kurang setuju 30 % = 12 dan tidak setuju 25%= 10. Sehingga jika diakumulasikan pendekatan tidak setuju adanya kutipan retribusi di kawasan wisata uncah 2000 Siosar Tanah Karo Sumatera Utara sebesar = 55 %. Dan yang setuju = 45 %.

Saran

- 1) Perlu ada bantuan dan ikuts serta pemerintahan daerah dalam pengelolaan kawasan wisata secara maksimal terutama dalam hal pembiayaan operasioan perawatan kawasan wisata, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan kutipan dan akan tetapi mendapat benefit dari kawasan wisata tersebut melalui perdagangan.
- 2) Dalam upaya pengadaan biaya perawatan kawasan wisata baiknya dimasukkan dalam anggaran desa dan jika perlu diberdayalan dana CSR dari perusahaan wilayah desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2013, September 23). Desa Wisata Taman Sari Banyuwangi. Retrieved Maret 04, 2019, from pelita desa:
<http://www.pelitadesa.com/desa-wisata-taman-sari-banyuwangi/>
- Bojonegoro, B. K. (2017). Kecamatan Sekar Dalam Angka. Retrieved Maret 11, 2019, from Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro:
<https://bojonegorokab.bps.go.id/publication/2017/09/19/c770a13faae89261b2db9538/kecamatan-sekar-dalam-angka-2017.html>
- Disbudpar. (2017, Mei 18). Negeri Atas Angin. Retrieved Februari 24, 2019, from wisatabojonegoro: <https://wisatabojonegoro.com/negeri-atas-angin-2/>
- Kepariwisata, U. (2009, Januari 16). Undang-undang Republik Indonesia NOMOR 10.TAHUN 2009 tentang Kepariwisata. Retrieved Ferbuari 4, 2019, from Kemenpar:http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4636_1364UUtentangKepariwisataannet1.pdf
- Madafuri, B., & Suryawan, I. B. (2013). PENGEMBANGAN KAWASAN KAWAH IJEN SEBAGAI DESTINASI WISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Pariwisata*.
- Mentayani, I., & Ikaputri. (2012). Menggali Makna Arsitektur Vernakular: Ranah, Unsur, dan Aspek-Aspek Vernakularitas. *LANTING Journal of Architecture*.
- Ngatwanto, I. (2018). "The Freshwater World" Waduk Kedung Ombo sebagai Pusat Edukasi Ekosistem Air Tawar dengan Pendekatan Neo Vernacular Design. *surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Pramesti, A. (2012). Prospek dan Pengembangan Pariwisata Cavetubing Gua Pindul di Desa Bejiharjo Kecamtan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 18.
- Khairuddin Tampubolon, dkk (2021); Penyuluhan Tentang Mengenal Mesin Pompa Air dan Cara Perawatannya di Serikat Tolong Menolong Nurul Iman (STMNI) Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas; *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society);V.1,No.2;(1-8)*.
- Roswita Oesman, Rahmaniah Rahmaniah (2021); Sosialisasi Cara Membuat Sabun Cair untuk Rumah Tangga di Gang Fortuna Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas; *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society);V.1,No.2;(47-53)*.
- Surya Irawan, K Tampubolon, ELAZHARI (2021), Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair Organik Dari Air Kelapa Dan Molase, Nasi Basi, Kotoran Kambing Serta Activator Jenis Produk EM4; *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society);V.1,No.2;(1-18)*.
- Ida Zulfida, dkk (2021), Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen; *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society);V.1,No.2;(53-60)*.
- Ahmad Karim, dkk (2021), Pelatihan Pengolahan Nilai Mahasiswa Menggunakan Aplikasi Excel Bagi Dosen; *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society);V.1,No.2;(68-74)*.
- Ida Zulfida, Eri Samah (2021), Membangun Desa Mandiri Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa; *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society);V.1,No.1;(19-22)*.
- Tampubolon, K., Parinduri, R. Y., & Syafii, M. (2020). Pengembangan Bolu Tape Multi Varian dan Rasa di Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor., (pp. 385-396). *medan*.